

TINJAUAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PERIODE 1965-1978 DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI PANCASILA

Nyoman Putra Antara, Nin Yasmine Lisasih
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul,
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
Yasmine.lisasih@esaunggul.ac.id

Abstract

In the period 1965-1978 Indonesia's foreign policy was a free-active policy, the implementation of free-active politics was by freezing diplomatic relations and establishing good relations with the United States. The purpose of this writing is to examine whether free and active politics is in accordance with the principles of Pancasila Democracy. In the 1965-1978 era, based on the MPRS Decree, it was emphasized that Indonesia's foreign policy was a free-active policy. After Indonesia's attitude was considered aggressive with the existence of confrontation in the previous era, at this time foreign policy was directed at improving international relations.

Keywords: free and active politics, foreign policy, Pancasila democratic principles.

Abstrak

Pada periode 1965-1978 politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, implementasi politik bebas aktif adalah dengan melakukan pembekuan hubungan diplomatik dan menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji apakah politik bebas aktif tersebut telah sesuai dengan asas Demokrasi Pancasila. Pada era 1965-1978, berdasarkan Tap MPRS, ditekankan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas-aktif. Setelah sikap Indonesia dinilai agresif dengan adanya konfrontasi di era sebelumnya, pada masa ini kebijakan luar negeri diarahkan untuk memperbaiki hubungan-hubungan internasional.

Kata kunci: politik bebas aktif, politik luar negeri, asas demokrasi Pancasila.

Pendahuluan

Pada dasarnya, tujuan dari Demokrasi Pancasila adalah penerapan demokrasi yang mengedepankan sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dalam prakteknya, di era ini terdapat *dual-function* militer yang tidak hanya berperan di bidang keamanan saja, tetapi juga sudah masuk ke dalam bidang sosial-politik. Kenyataan ini dipicu oleh peristiwa G30S/PKI. Maka dari itu, militer yang direpresentasikan oleh Jenderal Soeharto menjadi pengambil keputusan yang paling

penting. Dalam seminar Angkatan Darat II yang diadakan di Bandung pada Agustus 1966, dibahas mengenai keterlibatan militer dalam seluruh aspek kehidupan di Indonesia, bahkan anggota militer bergerak ke Departemen Luar Negeri. (Leo Surya dinata : 1998): Peran militer dilembagakan di Deplu pada tahun 1970 dengan dibentuknya Direktorat Keamanan dan Penerangan, serta Pelaksana Khusus yang bertugas untuk menghadapi kegiatan-kegiatan partai komunis di luar negeri.

Berbeda dengan era kepemimpinan sebelumnya yang terkesan agresif dengan adanya konfrontasi, era ini dinilai lebih

lunak dan lebih tertarik pada pembenahan ekonomi, sebagaimana dikutip dari pidato Soeharto pada 31 Desember 1966 (Bantarto Bandoro: 1994): “Dalam rangka menciptakan solidaritas antar bangsa di dunia ini pada umumnya dan Asia Afrika pada khususnya, sikap sombong, kepemimpinan Indonesia yang mencolok, peranan berlaga seperti pioner, juara, dan sebagainya telah kita tinggalkan... dan kebijakan luar negeri kita pada masa yang akan datang akan diarahkan untuk memperbaiki hubungan-hubungan internasional...”

Tiga hal yang sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri Indonesia di periode ini adalah politik bebas-aktif, pembekuan hubungan diplomatik dengan RRC, serta hubungan yang semakin baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengimplementasian politik bebas aktif Indonesia telah sesuai dengan asas demokrasi Pancasila.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Hasil dan Pembahasan

Politik Bebas-Aktif di Tahun 1965-1978

Pada era sebelumnya, politik bebas-aktif yang telah dirumuskan sejak 1946 oleh Hatta dinilai telah diselewengkan dengan adanya Manifesto Politik Republik Indonesia, sehingga pada era ini MPRS menegaskan kembali landasan politik luar negeri Indonesia. (Marwati Djoened

Poesponegoro & Nugroho Notosusanto : 2010)

Berdasarkan Tap MPRS No. XXI/MPRS/1966 mengenai “Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia”, ditetapkanlah dua sifat politik luar negeri Indonesia, yaitu (Suradji & Pularjono : 2001),:

1. Bebas-aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
2. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dan Amanat Penderitaan Rakyat.

Di samping itu, dalam MPRS tersebut juga disebutkan tujuan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke;
2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu;
3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.

Politik luar negeri bebas-aktif ini juga ditegaskan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973 Bab III huruf B mengenai “Arah Pembangunan Jangka Panjang”. Dalam poin tersebut dijelaskan, dalam bidang politik luar negeri yang bebas-aktif diusahakan agar Indonesia terus dapat meningkatkan peranannya dalam

memberikan sumbangan untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera.

Berdasarkan penjabaran Tap MPR di atas mengenai arah politik bebas-aktif Indonesia, berikut adalah implementasinya selama era Demokrasi Pancasila I (Bambang Kismono Hadi & Machmud Syafrudin : 2009):

1. Diperkenalkannya kebijakan pintu terbuka karena politik bebas-aktif juga ditujukan untuk pembangunan ekonomi. Berdasarkan kebijakan ini, investasi asing jadi ditingkatkan dan bantuan asing untuk merehabilitasi ekonomi juga semakin banyak.
2. Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, meskipun Indonesia masih merasa khawatir dengan pangkalan militer asing yang dibangun di sana. Pada mulanya, kerja sama bilateral antara keduanya adalah pembentukan Komite Perbatasan Bersama (*Joint Border Committee*) pada tahun 1972 untuk menghadapi pemberontakan komunis di sepanjang Malaysia Timur.
3. Aktif mendukung dan menjadi sponsor pendirian ASEAN pada 8 Agustus 1967 untuk melakukan kerja sama ekonomi dan politik di kawasan Asia Tenggara, di samping juga karena Indonesia semakin menaruh perhatian pada regionalisme. Indonesia pun menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara ASEAN I di Bali di tahun yang sama.
4. Kembali aktif dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 (setelah sebelumnya keluar dari PBB pada 1 Januari 1965). Wakil dari Indonesia juga pernah memegang jabatan Presiden Majelis Umum PBB, yaitu Adam Malik pada tahun 1971. Selain itu, Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974.
5. Indonesia juga aktif dalam misi perdamaian PBB. Selama periode ini, Indonesia telah mengirimkan enam Kontingen Garuda, yaitu Konga III (dikirim ke Kongo pada bulan Desember 1963 sampai Agustus 1964), Konga IV, Konga V, dan Konga VII (dikirim ke Vietnam pada Januari 1974), Konga VI (dikirim ke Sinai, Mesir dan bertugas dari bulan Agustus 1973 sampai April 1974), serta Konga VIII (dikirim ke Sinai, Mesir, pada bulan September 1974).

Dari paparan di atas dapat kita pahami bahwa politik bebas aktif memenuhi asas demokrasi yang tercantum dalam sila ke empat. Hal ini dikarenakan politik bebas aktif bermaksud bebas bersuara dan aktif mengkampanyekan bebas aktif tersebut.

Pembekuan Hubungan Diplomatik Indonesia-RRC (Periode 1967-1977)

Sejak tahun 1967, terjadilah “pembekuan” hubungan antara Indonesia dengan RRC yang berlangsung hingga tahun 1990. Meskipun pembekuan hubungan ini berlangsung sangat lama, dalam periode ini, tepatnya di tahun 1977, RRC telah menunjukkan keinginannya untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Penyebab Memburuknya Hubungan Indonesia-RRC

Di era sebelumnya, hubungan antara Indonesia dan RRC sangat erat. RRC adalah mitra terdekat Indonesia dalam memperjuangkan NEFOS atau *New Emerging Forces*, namun hubungan diplomatik itu harus berakhir dengan diawali oleh adanya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Pemerintah Indonesia menuduh bahwa RRC telah membantu rencana PKI untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dan RRC

pun juga dituduh ingin mendorong adanya revolusi komunis di Indonesia.

Kecurigaan pemerintah Indonesia terhadap RRC pada saat itu bukan hanya berdasarkan ideologi komunis yang dianut RRC, tetapi juga karena RRC memberikan suaka politik kepada beberapa tokoh pimpinan PKI yang melarikan diri ke wilayah RRC. Di samping itu, kedutaan besar RRC di Jakarta menolak untuk menaikkan bendera setengah tiang dalam rangka menghormati tujuh pahlawan revolusi yang diduga dibunuh oleh PKI. RRC juga diduga menyelundupkan senjata-senjata untuk mempersenjatai PKI. Di akhir tahun 1950-an, Presiden Soekarno mengirim kepala staff Angkatan Udara, Omar Dhani untuk berunding dengan RRC dengan tujuan mendapatkan bantuan senjata bagi “Angkatan Ke Lima”, yaitu perkumpulan petani dan buruh yang berada di bawah kontrol PKI. Pasokan senjata ini di luar pengetahuan dan otoritas militer Indonesia.

Bagi pemerintah Indonesia, isu mengenai keterlibatan RRC dalam peristiwa G30S/PKI menjadi masalah yang utama pada saat itu. Berbagai hal dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengecam RRC. Pada bulan September 1966, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik secara terang-terangan menuduh RRC telah ikut campur dalam masalah domestik Indonesia dengan membantu usaha kudeta yang dilakukan oleh PKI. Pada akhir bulan Maret 1967, Adam Malik juga menuduh RRC telah memberikan pelatihan kepada ratusan orang Indonesia yang tinggal di RRC, agar mereka dapat melakukan sabotase dalam bidang militer dan ekonomi di Indonesia. Kecaman tersebut ditanggapi dengan kecaman juga oleh RRC. Pemerintah RRC melihat bahwa pemerintahan militer Indonesia adalah pemerintahan yang “reaksioner” dan “fasis”. Pada bulan April 1967, Menteri Keamanan RRC yang juga merupakan Wakil Perdana Menteri Xian

Fuzhi menyampaikan pidato dalam rapat umum di Beijing yang juga dihadiri oleh seorang tokoh PKI Djawoto. Dalam pidatonya itu, Xian Fuzhi menyampaikan kecaman, serta mencaci pemerintah dan pemimpin di Indonesia.

Setelah pemerintah Indonesia dan RRC saling memberikan kecaman, muncul juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh massa. Di Jakarta, gerakan anti terhadap RRC dilakukan oleh pemuda dan mahasiswa yang merusak kedutaan besar RRC di Glodok. Di samping itu, di Beijing pun terjadi hal yang serupa. Para pemuda berdemonstrasi dengan poster-poster yang mengecam Indonesia di kedutaan besar RI. Pada bulan Agustus 1967, mereka berdemonstrasi selama lima hari dan membakar kedutaan besar RI.

Aksi massa yang terjadi di kedua negara menimbulkan sikap saling mengusir staff diplomatik. Pada bulan April 1967, pemerintah Indonesia memerintahkan dua orang diplomat RRC untuk kembali ke negaranya, yaitu Yao Dengshan dan Xu Ren. Sikap itu dibalas oleh RRC dengan meminta Baron Sutadisastra dan Sumarno untuk kembali ke Indonesia. Pada bulan Agustus di tahun yang sama, pemerintah Indonesia menyuruh semua staff diplomatik yang berada di RRC untuk kembali ke Indonesia, kemudian bulan depannya pemerintah RRC juga meminta dua staffnya untuk kembali, yaitu Lu Zubo dan Xu Sheng. Di bulan yang sama, Menteri Luar Negeri Adam Malik menyuruh semua staff KBRI di RRC untuk kembali ke Indonesia dan kemudian RRC menetapkan dua orang diplomat Indonesia, yaitu Nahar Syamsudin dan Rumamby sebagai *persona non grata*.

Pembekuan Hubungan Diplomatik Indonesia-RRC

Sikap saling kecam-mengecam yang telah terjadi selama dua tahun tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 23

Oktober 1967. Pemerintah Indonesia mengirimkan memorandum dari Departemen Luar Negeri ke Beijing yang berisi tentang keinginannya atas pembekuan hubungan diplomatik mulai tanggal 30 Oktober 1967. Sejak pembekuan hubungan tersebut, keperluan RRC di Indonesia diurus oleh kedutaan besar Rumania, sedangkan keperluan Indonesia di RRC diurus oleh kedutaan besar Pakistan.

Di samping itu, Indonesia yang telah diterima kembali dalam keanggotaan PBB tidak mendukung masuknya RRC ke dalam organisasi tersebut. Setiap kali kursi RRC dibicarakan di forum PBB dan pengambilan keputusan dilakukan untuk isu tersebut, Indonesia selalu memberikan jawaban abstain.

Usaha Normalisasi Hubungan Indonesia-RRC

Tiga tahun setelah dibekukannya hubungan diplomatik Indonesia-RRC, muncul usaha-usaha normalisasi yang sebenarnya baru akan terlaksana pada tahun 1990. Meskipun demikian, tahun 1970 sampai dengan 1977 yang merupakan periode pertama politik normalisasi telah membawa harapan untuk mencairkan hubungan.

Keinginan RRC untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Indonesia mulai terlihat setelah RRC bergabung dengan PBB pada tahun 1971. Keinginan RRC juga semakin terlihat pada tahun 1973, tepatnya pada saat konferensi mengenai Vietnam di Paris. Pada saat itu, Menlu RI Adam Malik dan Menlu RRC Ji Pengfei mengadakan pertemuan informal. Di tahun itu pun RRC telah memberikan dukungannya untuk memihak Indonesia dalam perselisihan mengenai Selat Malaka, menyambut baik pembentukan ASEAN, pengapalan beras melalui Hong Kong, serta mengundang olahragawan dan pengamat Indonesia ke berbagai turnamen di RRC. Pada tahun 1974, RRC juga

berusaha untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara Dunia Ke Tiga, termasuk ke dalamnya adalah tiga negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand. Meskipun demikian, usaha yang dilakukan RRC tersebut tidak menghasilkan apapun. Adam Malik ingin menunda pencairan hubungan antara Indonesia dan RRC. Pada saat itu, pemerintah Indonesia menginginkan hubungan antara kedua negara ini sampai pada tahap saling memahami saja. Adam Malik mengatakan bahwa Indonesia akan menormalkan hubungannya dengan RRC, jika semua negara ASEAN telah membuka hubungan dengan RRC.

Di samping ketidakinginan Adam Malik untuk segera memperbaiki hubungan dengan RRC, Presiden Soeharto pun memberikan pernyataan bahwa Indonesia akan siap menjalin hubungan lagi dengan RRC, jika RRC sudah benar-benar bersikap bersahabat dan berhenti memberikan bantuan dan fasilitas terhadap para mantan pimpinan PKI. Soeharto juga memberikan tiga syarat yang harus dipenuhi pihak RRC sebelum melakukan normalisasi hubungan, yaitu untuk mengakui pemerintahan Orde Baru, menghormati integritas Indonesia, dan untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri Indonesia.

Sikap pemerintah Indonesia yang belum ingin memperbaiki hubungan dengan RRC dinilai menentang "semangat zaman" di tahun-tahun tersebut. Di tahun 1970-an, posisi RRC semakin penting dalam politik regional, maupun global, sehingga negara-negara ASEAN dan bahkan Amerika Serikat pun mengadakan pendekatan untuk menjalin hubungan dengan RRC. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Adam Malik menjelaskan bahwa masih ada dua hal yang mengganjal untuk memperbaiki hubungan dengan RRC. Masalah yang pertama adalah masalah keamanan, sedangkan yang ke dua adalah masalah minoritas.

Mengenai masalah keamanan, pemerintah Indonesia merasa bahwa RRC masih melakukan tindakan yang memusuhi rakyat Indonesia. Setelah sebelumnya RRC diduga mendorong terjadinya G30S/PKI, kecurigaan juga muncul karena mantan-mantan pemimpin PKI masih banyak yang bertahan di RRC dan pemerintah RRC juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk PKI yang ke-55. Mengenai masalah minoritas, pemerintah Indonesia memiliki kecurigaan bahwa RRC akan memanfaatkan masyarakat keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia untuk kepentingan nasionalnya, sehingga mereka harus dididik terlebih dahulu, agar memiliki kesetiaan pada negara Indonesia.

Harapan perbaikan hubungan diplomatik Indonesia-RRC muncul setelah kematian Mao Zedong pada tahun 1976. Setelah kematian Mao, RRC tidak lagi menitikberatkan pada pengiriman gerakan-gerakan komunis ke luar negeri, melainkan pada soal-soal pembangunan ekonomi dalam negeri. Maka dari itu, pada akhir Desember 1976, Adam Malik menyatakan tiga hal, yaitu:

1. Normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-RRC akan dilakukan setelah pemilu 1977.
2. Selama beberapa tahun belakangan, Adam Malik telah bertemu dengan para pejabat RRC di luar negeri dan telah membicarakan mengenai hambatan-hambatan normalisasi.
3. Pemerintah RRC telah menghentikan propaganda anti Indonesia dan berjanji untuk tidak mendukung pelarian komunis Indonesia yang mencari perlindungan ke RRC.

Pada bulan Oktober 1977, Adam Malik bertemu dengan Menteri Luar Negeri RRC Huang Hua di New York. Saat itu, RRC dipimpin oleh Deng Xiaoping yang mendorong politik luar negeri yang lebih moderat dan melancarkan program modernisasi yang

memerlukan investasi asing, teknologi tinggi, serta situasi politik yang stabil. Maka dari itu, RRC mulai menjalin hubungan dengan negara-negara non-komunis. Setelah naiknya Deng Xiaoping sebagai Presiden RRC, para pemimpin di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kelompok pro-normalisasi dan anti-normalisasi.

Kelompok pro-normalisasi terdiri dari para usahawan dan para pejabat Deplu, khususnya Adam Malik sebagai Menlu. Para usahawan berpendapat bahwa dengan adanya normalisasi hubungan, ekspor Indonesia ke RRC akan meningkat dan hal ini akan mendorong berkembangnya bisnis di Indonesia, sedangkan para pejabat Deplu menganggap bahwa normalisasi akan memproyeksikan citra Indonesia sebagai negara nonblok di luar negeri. Maka dari itu, dalam berbagai wawancara di media, Adam Malik menyatakan bahwa antara Jakarta dan Beijing sudah tidak ada masalah karena RRC telah menghentikan propaganda anti-Indonesia dan tidak lagi mendukung PKI.

Sebaliknya, kelompok anti-normalisasi terdiri dari kalangan militer, kelompok Islam, dan termasuk juga Presiden Soeharto. Kelompok ini masih menganggap bahwa dengan diadakannya normalisasi, keamanan dalam negeri Indonesia akan terancam dengan kembalinya partai komunis. Maka dari itu, Presiden Soeharto belum menyetujui pendapat Adam Malik mengenai normalisasi hubungan. Ia mengatakan bahwa Adam Malik telah membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam isu-isu politik. Di akhir periode Demokrasi Pancasila I, Soeharto masih berpandangan bahwa RRC tetap menyokong PKI dan hal ini dianggap sebagai intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia. Soeharto meminta agar RRC memutuskan hubungannya dengan semua partai

komunis di wilayah regional sebelum hubungan diplomatik dengan Indonesia dinormalkan kembali. Karena dukungan dari kelompok anti-normalisasi ini lebih besar, perbaikan hubungan antara Indonesia-RRC belum juga menemui titik terang.

Dari paparan di atas dapat kita pahami bahwa pembekuan hubungan diplomatik Indonesia dengan RRC merupakan bentuk pengimplementasian politik bebas aktif yang mengedepankan asas demokrasi Pancasila karena pembekuan hubungan diplomatik tersebut termasuk penghentian paham komunis yang disebarkan oleh RRC pada masa G-30S/PKI.

Perbaikan Hubungan Diplomatik Indonesia-Amerika Serikat (Periode 1965-1976)

Di saat hubungan diplomatik Indonesia-RRC sedang memburuk dalam periode ini, hal sebaliknya terjadi dalam hubungan Indonesia dengan AS (dan negara-negara barat). Seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya, peristiwa G30S/PKI telah memunculkan perkembangan anti komunisme di Indonesia, sehingga perlawanan AS terhadap Vietnam dan komunisme di Asia dilihat sebagai hal yang baik oleh pemerintah Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan AS pun diterima oleh pemerintah Indonesia dengan tangan terbuka.

Selain alasan penghaluan komunisme, hubungan diplomatik Indonesia-AS yang membaik juga disebabkan oleh kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu. Presiden Soeharto menginginkan “diplomasi pembangunan” sebagai prioritas utama untuk merekonstruksi perekonomian dalam negeri, sehingga pemerintah Indonesia merasa bergantung pada AS.

Hubungan Indonesia-AS dalam Bidang Ekonomi

Pada tahun 1966, situasi ekonomi di Indonesia sangat memburuk, terutama dalam situasi pangan dan kehancuran moneter dengan inflasi mencapai 660%. Pemerintahan Soeharto telah meninggalkan politik berdikari Soekarno dan secara aktif mendorong investasi, serta bantuan asing. Kebijakan Orde Baru yang membuka diri terhadap investasi ini mendorong negara-negara barat untuk memainkan peran ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1967, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dengan AS untuk memberikan jaminan bagi para investor AS di Indonesia.

Pada tahun 1967 sampai dengan 1969, Duta Besar AS untuk Indonesia Frank Galbraith mengusahakan bantuan ODA (*Official Development Assistance*) yang merehabilitasi perekonomian di Indonesia.

Untuk memperbaiki situasi pangan, AS yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Lyndon Johnson (1965-1968) memberikan bantuan “*food for work*” di Jawa Tengah. Untuk memperbaiki moneter, AS memberikan bantuan hutang dengan mengadakan pertemuan di Paris dan Tokyo. Negara-negara barat dan Jepang berpendapat bahwa dengan tidak adanya bantuan asing, maka Indonesia tidak akan mampu bertahan. Maka dari itu, pada tahun 1967 dibentuklah *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) yang beranggotakan enam negara pendonor dana untuk Indonesia (Australia, Jerman, Jepang, Belanda, Inggris, dan AS). AS juga memberikan bantuan kepada Indonesia melalui *State Department*, AID (*Agency for International Development*), NSC (*National Security Council*), serta DoD (*Department of Defense*). Meskipun pada awal masa Orde Baru ini Indonesia tidak lagi bermusuhan dengan AS seperti pada masa Orde Lama, Indonesia tetap menunjukkan prinsip-prinsip *non-aligned*

(nonblok) terhadap AS dan menyatakan bahwa Indonesia bukanlah sekutu AS. Hal ini dapat dilihat dari sikap Indonesia yang tidak pernah mendukung AS untuk membangun pangkalan militernya di kawasan Asia Tenggara.

Pada saat AS masih dipimpin oleh Presiden Lyndon Johnson, di tahun 1967 Richard Nixon (1968-1972) telah berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Soeharto, serta Dubes AS untuk Indonesia, Marshall Green. Dalam kunjungannya itu, Presiden Nixon memandang bahwa Presiden Soeharto yang dikabarkan ikut andil dalam peristiwa G30S/PKI sebenarnya tidak bersalah dan oleh karenanya perlu dibantu. Maka dari itu, pada masa pemerintahan Presiden Nixon, hubungan Indonesia dengan AS sedang berada di puncaknya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bantuan ekonomi dari AS untuk Indonesia, yaitu sekitar 1/3 dari keseluruhan bantuan IGGI sampai dengan tahun 1973. AS juga memberikan bantuan pangan yang disebut PL-480, bantuan latihan militer untuk perwira-perwira ABRI, serta kredit untuk pembelian persenjataan ABRI.

Meskipun Indonesia tetap menyatakan bahwa Indonesia bukan sekutu AS (*non-aligned*), hubungan bilateral Indonesia-AS tetap baik.

Hubungan Indonesia-AS dalam Bidang Non-Ekonomi

Di samping adanya bantuan ekonomi yang diberikan oleh AS kepada Indonesia, pihak AS pun juga meminta bantuan kepada Indonesia. Pada tahun 1973, di masa pemerintahan Nixon, AS meminta Indonesia untuk memberikan pasukan-pasukannya dalam rangka ICCS (*International Commission for Control and Security*) yang pada saat itu bertugas untuk mengawasi hasil-hasil Konferensi Paris dan memisahkan pasukan-pasukan

Vietnam Utara dengan pasukan-pasukan Vietnam Selatan.

Pada tahun 1975, Ali Moertopo (yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara RI, sekaligus asisten pribadi Presiden Soeharto) berpidato di depan rombongan *House of Representatives* dalam rangka membuat landasan hubungan dengan Kongres AS yang selanjutnya dimasukkan ke dalam *Congressional Record*. Pada masa pemerintahan Presiden Gerald Ford (1973-1976) itu, AS sedang mengalami trauma-trauma atas kekalahannya di Perang Vietnam pada tahun 1975, serta Krisis Watergate. Krisis Watergate adalah krisis moral yang terjadi di AS pada awal tahun 1970-an. Pada saat itu, terjadi berbagai skandal dalam bisnis di AS. Para pebisnis menyuap politisi atau memberikan sumbangan ilegal untuk kampanye politik dan korupsi pun semakin banyak. Maka dari itu, peran Kongres dalam sistem pengambilan keputusan luar negeri AS menjadi lebih besar. (Kees Bertens : 2000).

Pada masa pemerintahan Presiden Ford, Indonesia mendapat bantuan peralatan angkatan bersenjata. Di samping itu, dalam periode pemerintahan Ford tersebut, bantuan bagi Indonesia yang sangat terlihat adalah dalam masalah mengenai Timor Timur. Pada akhir tahun 1976, muncul isu-isu mengenai masalah penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Pada bulan April 1974, berlangsunglah Revolusi Bunga di Portugal yang menghasilkan pernyataan pemerintah Portugal bahwa propinsinya yang berada di luar kawasan Portugal (termasuk Timor Timur) diizinkan untuk menjalankan hak menentukan nasib sendiri dan diberi kemerdekaan. Pada bulan Mei, sekelompok masyarakat yang mendukung penggabungan Timor Timur ke Indonesia membentuk partai Apodeti. Di samping itu, dibentuk juga dua partai lain, yaitu UDT dan Fretilin yang

kemudian bergabung. Pada tahun 1975, Fretilin berubah menjadi militan dan terlihat seperti berusaha mengambil alih UDT. Hal ini menimbulkan pecahnya perang saudara. Pada saat itu, Indonesia merasa khawatir akan tiga hal:

1. Timor Timur yang baru merdeka dalam suasana Perang Dingin akan sangat rentan terhadap intervensi asing.
2. Kemerdekaan Timor Timur bisa menjadi contoh bagi kelompok-kelompok etnis lainnya di Indonesia untuk membentuk negara sendiri.
3. Indonesia curiga atas hubungan Fretilin dengan partai komunis di Portugal dan hal ini berujung pada pengiriman pasukan "sukarelawan" Indonesia untuk operasi militer di Timor Timur dan memberantas Fretilin. Poin ke tiga ini pun didukung oleh Apodeti dan UDT.

Meskipun Dewan Keamanan PBB telah memperingatkan Indonesia untuk segera keluar dari Timor Timur pada Desember 1975, Indonesia terus mengirimkan pasukan "sukarelawan" karena merasa masyarakat Timor Timur meminta pemerintah Indonesia untuk menjaga ketertiban dan keamanan di sana. Pada bulan Juli 1976, Timor Timur secara resmi berintegrasi dengan Indonesia. Administrasi AS pada dasarnya tidak mempersoalkan masalah penggabungan Timor Timur atau intervensi Indonesia dalam perang saudara di sana. Meskipun demikian, AS memberikan bantuan dalam beberapa hal, misalnya membantu penyelesaian masalah *basic human needs* dengan bantuan AID melalui CRS (*Catholic Relief Services*) dan ICRC (*International Committee of the Red Cross*).

Selain bantuan kemanusiaan yang diberikan AS dalam Perang Saudara yang terjadi di Timor Timur, AS juga menekan pemerintah Indonesia mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1978. Maka dari itu,

atas desakan dari AS, pemerintah Indonesia membebaskan tahanan-tahanan politik yang diduga ikut andil dalam kudeta tahun 1965.

Dari paparan di atas dapat kita pahami bahwa hubungan diplomatic Indonesia dengan AS memenuhi asas demokrasi Pancasila, terbukti dengan berhasilkan Langkah politik Indonesia sehingga AS memberikan bantuan ekonomi pada Indonesia.

Kesimpulan

Pada era 1965-1978, berdasarkan Tap MPRS, ditegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas-aktif. Setelah sikap Indonesia dinilai agresif dengan adanya konfrontasi di era sebelumnya, pada masa ini kebijakan luar negeri diarahkan untuk memperbaiki hubungan-hubungan internasional. Indonesia sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan internasional, seperti PBB, ASEAN, serta misi perdamaian PBB dengan mengirimkan Konga. Politik bebas aktif tersebut memenuhi asas Demokrasi Pancasila yang tertuang dalam sila keempat. Pengimplementasian Asas Demokrasi dalam politik luar negeri bebas aktif juga terbukti dengan Tindakan pembekuan hubungan diplomatic Indonesia dengan RRC dan sitem politik Indonesia yang berhasil membuat AS memberikan bantuan ekonomi pada Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bandoro, Bantarto. 1994. *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Bertens, Kees. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hadi, Bambang Kismono & Syafrudin, Machmud. 2009. *Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: IDSPS

- Poesponegoro, Marwati Djoened & Notosusanto, Nugroho. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Suradji & Pularjono, 2001. *Himpunan Beranotasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2001*. Jakarta: Tatanusa
- Suryadinata, Leo. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES